

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya keinginan masyarakat untuk kesejahteraan yang adil telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun akuntabilitas publik. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas publik" yaitu kewajiban (agen) pihak pemegang amanah untuk menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala perbuatan dan kegiatan yang berada dalam kekuasaannya kepada pihak yang memberinya amanah (*principal*), yang mempunyai wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.<sup>1</sup> *Agent* merujuk pada pemerintah dan *principal* merujuk pada masyarakat desa.

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan publik. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perlu diingat bahwa pemerintahan daerah Indonesia menciptakan peluang hak dan wewenang untuk mengatur dan mengendalikan potensi pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Dana desa berasal dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), dimana pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa kepada seluruh desa, yang digunakan untuk pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata kelola pada masing-masing pemerintahan dimana dalam penyelenggaraan pemerintah desa seluruh akhir kegiataannya harus di pertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual juga mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan yang

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2002), 20.

<sup>2</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa", <https://peraturan.go.id/home/netails/38582/uu-no-6-tahun-2014> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

<sup>3</sup> "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah", <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/4876> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

berkualitas harus memenuhi kriteria dan faktor yang menentukan kualitas informasi yang merupakan informasi yang berharga dan berguna dalam pelaporan keuangan pemerintah. Seperti yang ditunjukkan dalam Menerapkan Standar Akuntansi Negara Kerangka Konseptual Akuntansi Negara termasuk yang relevan, andal, sebanding, dan mudah dipahami.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan Informasi yang bermanfaat bagi Para Pemakai, Pemerintah Indonesia menggunakan laporan keuangan yang akuntabel, khususnya di bidang keuangan Desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mempublikasikan penyajian laporan keuangan tahunan kepada pemangku kepentingan.<sup>5</sup> Seperti diketahui, Banyak partai politik mendasarkan keputusannya pada fakta-fakta yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah desa. Masyarakat, lembaga perwakilan, auditor, pengawas, dan lain-lain termasuk di antara pihak-pihak tersebut. Akibatnya, informasi data harus bermanfaat bagi pengguna.<sup>6</sup>

Salah satu komponen kualitatif yang terkait langsung dengan informasi dalam penyajian pelaporan keuangan pemerintah adalah keandalan. Kapasitas informasi untuk menjamin kepercayaan bahwa itu asli dan valid disebut sebagai keandalan.<sup>7</sup> Laporan keuangan dianggap andal untuk membuat keputusan yang tepat jika semua fakta disajikan secara wajar dan dapat diverifikasi, tanpa asumsi yang menyesatkan atau kesalahan material. Saat menyajikan keputusan, jika informasinya tidak dapat diandalkan, pengguna informasi tidak mempercayai informasi yang disajikan.<sup>8</sup> Keterandalan pelaporan

---

<sup>4</sup> Eva Saras Sati, “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)”, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, (2018), 1.

<sup>5</sup> Anando Iphan Kosegeran, Lintje Kalangi, and Heince Wokas, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Akuntansi*, (2018), 178.

<sup>6</sup> Yhuni Ikromatun Nisa, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa”, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, (2021), 2-3.

<sup>7</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah desa Di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Akuntansi* 5, No. 2 (2017), 89.

<sup>8</sup> Warih Komarasari, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi

keuangan pemerintah desa mendorong kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.<sup>9</sup> Hal ini dijelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

Hasil opini pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tidak berubah dari tahun 2010 hingga 2021. Dengan kata lain, itu adalah pendapat yang adil, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara sangat baik. Opini diatas menggambarkan bahwa Kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah semuanya dianggap memadai. Akan tetapi, Meski telah meraih opini WTP, Pemda Kabupaten Jepara telah dinilai sepenuhnya baik karena kinerjanya. Untuk itu, Pemda Kabupaten Jepara harus memperhatikan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.<sup>10</sup> Pemikiran untuk mempertahankan pandangan ini yakni, kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Adapun daftar tanggapan hasil pengujian LKPD oleh BPK Jawa Tengah tahun 2012-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

---

*Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul bagian Akuntansi dan Keuangan)”, Jurnal Akuntansi, (2017), 1.*

<sup>9</sup> Irshani Ashrawiyadi dan Ikhsan Budi Riharjo, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur*”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6, No. 12 (2017), 2.

<sup>10</sup> “Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia”, <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

**Tabel 1. 1**  
**Opini Terhadap Audit Akuntansi Tahunan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Jepara**

<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: Jateng.bpk.go.id. (2021).*

Kualitas pelaporan keuangan yang dapat diaudit mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 1.1, terutama yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan. Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada pelaporan keuangan perlu diteliti lebih mendalam pada tingkat bawah yaitu pada pemerintah desa karena pemerintah desa menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dan sebagai penerima dana paling akhir untuk kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu untuk mengkaji keandalan pelaporan keuangan kepada pemerintah desa yang diteliti di kecamatan Kedung yang merupakan salah satu kecamatan di Jepara.

Subyek survei ini adalah pemerintah desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Penelitian dilakukan di Organisasi Perangkat Desa (OPD) di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, salah satu alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Kedung adalah karena wilayah tersebut termasuk kecamatan yang masih berkembang, dimana dari 18 desa diantaranya masih berkembang. Kecamatan Kedung memiliki indeks desa membangun dengan status desa berkembang.<sup>11</sup> Sesuai dengan pertimbangan

<sup>11</sup> “SiDesa Jawa Tengah, 2021.”

<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kabupaten/33.20> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

karakteristik keandalan penelitian ini memilih objek di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. dimana informasi tersebut mencakup unsur penyajian yang jujur dan dapat diverifikasi dan harus netral. Melihat Kecamatan Kedung adalah Kecamatan yang masih berkembang, maka kebutuhan administrasi pelaporan keuangan sangat dibutuhkan terlebih untuk di publikasikan. Untuk mempublikasikan laporan keuangan tentunya harus memenuhi karakteristik laporan keuangan salah satunya andal/keandalan yang sesuai dengan penelitian ini.

Untuk mengelola keuangan pemerintah desa diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten. Dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai sebagai sumber daya manusia, kemampuan individu atau organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya.<sup>12</sup> Pegawai yang memahami pengolahan data mempengaruhi penyajian laporan keuangan.<sup>13</sup> Untuk mengelola keuangan pemerintah desa secara efektif, perangkat desa saat ini membutuhkan keterampilan atau sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan keuangan yang mendukung, dengan pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi yang memadai. Sehingga mereka mampu melaksanakan dan memahami logika akuntansi saat menggunakan sistem akuntansi.<sup>14</sup>

Kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menghasilkan suatu informasi yang andal.<sup>15</sup> Namun, banyak desa yang tidak memperhatikan kemampuan adanya sumber daya manusia dalam

---

<sup>12</sup> Karmila, dkk, *“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Pemerintah Provinsi Riau)”*, Jurnal SOROT 9, No. 1 (2012), 27-28.

<sup>13</sup> Annisa Maharani dan Henri Agustin, *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari (Studi Empiris Pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar)”*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi 3, No. 1, (2021), 34-35.

<sup>14</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani, *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah desa Di Kabupaten Klaten”*, Jurnal Akuntansi 5, No. 2 (2017), 89.

<sup>15</sup> Irshani Ashrawiyadi dan Ikhsan Budi Riharjo, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur”*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6, No. 12 (2017), 5.

bidang akuntansi dan banyak pemangku kepentingan atau masyarakat umum yang tidak setuju dengan informasi penyajian dalam laporan keuangan. Karena kurangnya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi, perangkat desa kurang memiliki pemahaman dan kompetensi untuk mengelola dan melaporkan keuangan desa secara tepat dan akurat. Jika pelaku sistem akuntansi sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan keahlian dan karakteristik yang dipersyaratkan, kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan sebagai produk sistem akuntansi, termasuk keterandalan menjadi informasi yang tidak ada atau akan menjadi buruk. Oleh karena itu, kami membutuhkan dan pegawai yang terlatih dan berpengalaman luas di bidang akuntansi, serta pegawai dengan pendidikan akuntansi yang sesuai.<sup>16</sup>

Pelaporan keuangan juga mempengaruhi sistem pengendalian internal. Inilah sistem pengendalian intern yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Republik Indonesia. yaitu Pimpinan dan staf/pegawai melaksanakan tindakan dan kegiatan secara teratur untuk membangun kepercayaan yang tepat untuk pencapaian tertentu. Tujuan organisasi, Keyakinan dalam pelaporan keuangan, perlindungan aset pemerintah dari undang-undang.<sup>17</sup> Saat menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah desa, berlaku prosedur operasi standar sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang ada. Ini harus diikuti untuk meminimalkan kesalahan dan penyelewengan. Menetapkan standar kompetensi untuk memungkinkan keterampilan teknis untuk percaya diri dalam mengelola gelar dan untuk mendistribusikan tanggung jawab sesuai dengan posisi dan fungsi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah desa Di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Akuntansi* 5, No. 2 (2017), 89-90.

<sup>17</sup> Dita Arfianti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)”, *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, (Semarang: 2011), 11.

<sup>18</sup> Della Sartika dan Rohmad Yuliantoro C.W, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan*, (Jakarta: 2019).

Selain sistem pengendalian internal, pengawasan keuangan daerah juga mempengaruhi keandalan laporan. Prosedur untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mengikuti semua rencana dan peraturan/hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 yang menetapkan standar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 16).<sup>20</sup> Pengawasan keuangan daerah membantu penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan anggaran keuangan. pengawasan keuangan daerah juga dapat membantu pemerintah mengelola semua kegiatan perangkat desa. pengawasan keuangan dalam rangka pemerintahan sangat penting dan aparat pemerintah sendiri tidak melakukan hal-hal atau kecurangan. Probabilitas kecurangan atau kesalahan rendah jika pemerintah melakukan pekerjaan pengawasan ini dengan baik dan tepat.<sup>21</sup>

Beberapa penelitian terdahulu pada penelitian kendalan pelaporan keuangan pemerintah desa yaitu, dilakukan oleh Reza Uswatun Hasanah, mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Dan penelitian yang telah dilakukan oleh Yhuni Ikromatun, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Selanjutnya penelitian oleh Della Sartika dan Rohmad Yuliantoro C.W. Menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan

---

<sup>19</sup> Eva Saras Sati, “*Faktor-faktor Yang Memengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang)*”, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (2018), 5

<sup>20</sup> Rizki Agus Putra, “*Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan. Keuangan Daerah, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)*”, JOM Fekon 4, No.1 (2017), 1039.

<sup>21</sup> Fransiska, “*Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu)*”, JOM FEKOM 2, No.2 (2015), 2-3.

pemerintah desa, sementara pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Selain itu penelitian dilakukan oleh Lelly Rahayu dan Dessy putri Andini, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi serta kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan pemerintah desa, sementara komitmen organisasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penulis ingin menguji kembali dengan menggabungkan tiga variabel menggunakan komponen yang berbeda dalam satu penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kedua, membuktikan apakah ada pengaruh dan hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Ketiga, menguji lebih lanjut apakah pemerintah desa Kecamatan Kedung sudah menjalankan seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara baik dalam mengelola laporan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang serta uraian diatas, menjadikan penulis tertarik untuk kembali melakukan pengujian yang lebih mendalam dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris Pemerintah Desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di kecamatan kedung?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di kecamatan kedung?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di kecamatan kedung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di kecamatan kedung.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di kecamatan kedung.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa di kecamatan kedung.

### D. Manfaat Penelitian

Menurut tujuan penelitian yang tercantum di atas, temuan penelitian ini diperkirakan akan membawa keuntungan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan referensi dalam mengembangkan ilmu akuntansi khususnya dalam laporan keuangan yakni, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
2. Manfaat praktis  
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan memberikan wawasan dan pemahaman kepada pihak yang berkepentingan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, berikut deskripsi sistematika penulisan dalam masing-masing bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisi uraian yang menjelaskan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi uraian tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu, jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yakni, gambaran obyek penelitian, hasil analisis data, interpretasi pembahasan dari hasil penelitian yang sesuai terkait penelitian yang dilakukan.

**BAB V PENUTUP**

Bagian akhir dari penulisan ini mengenai uraian dari hasil seluruh penelitian dalam simpulan dan saran untuk peneliti.

